

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI BADAN KEPAGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL VII KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Nama : Tubagus Roqi

NIM : 222016149

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2022

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI BADAN KEPAGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL VII KOTA PALEMBANG**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Tubagus Roqi
NIM 222016149**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tubagus Roqi

Nim : 222016149

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : Akuntansi

Judul skripsi : Analisis Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di BKN Kantor Regional VII Kota Palembang)

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 26 Juni 2022



Tubagus Roqi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Dalam
Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi di BKN Kantor Regional VII Kota Palembang

Nama : Tubagus Roqi
NIM : 222016149
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

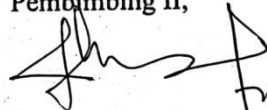
Diterima dan disahkan
Pada tanggal 31 Agustus 2022...

Pembimbing I,



Dr. Betri, S.E. Ak., M.Si, C.A
NIDN/NBM : 021610802/944806

Pembimbing II,



Nina Sabrina, SE.Ak, M.Si
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Akuntansi



MOTTO

*Keberhasilan itu pasti ada selagi mau berusaha dan berdoa
Never stop trying*

☞ *Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

Mama dan papa tercinta

Kakak dan adikku

Keluarga besarku

Rekan kerjaku

Para Sahabatku

Pembimbingku

Almamaterku



PRAKATA

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke khadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya jua, akhirnya skripsi yang berjudul :

Analisis Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di BKN Kantor Regional VII Kota Palembang, telah selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama serta motivasi dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memanjatkan doa untuk keberhasilan anaknya, serta senantiasa memotivasi dan menasihati dengan penuh kasih sayang.

Penulis juga menyampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., M.M.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Yudha Mahrom, SE., M.Si
3. Ketua Program Studi Akuntansi sekaligus Pembimbing I, Bapak Dr. Betri, SE.Ak., M.Si yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis
4. Pembimbing II, Ibu Nina Sabrina, SE.Ak, M.Si yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sifatnya menyempurkan skripsi ini.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Serta sahabat-sahabatku.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatatnya sebagai ibadah di sisi-Nya. Aamiin ya robbal alaamin.

Walaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh

Palembang, 31 Agustus 2022

Penulis,

Tubagus Roqi



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II Kajian Pustaka	
A. Landasan Teori	9
B. Penelitian Sebelumnya	30
BAB III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Operasionalisasi Variabel	35
D. Data Yang Diperlukan	38
E. Metode Pengumpulan Data	38
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	52
BAB V Simpulan dan Saran	
A. Simpulan	60
B. Saran	61
Daftar Pustaka	62

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Jumlah wajib pajak terdaftar di BKN Kantor Regional VII Kota Palembang	6
II.1 Penelitian Sebelumnya	32
III.1 Operasional Variabel	35

ABSTRAK

Tubagus Roqi / 222016149 / 2016 / Analisis Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di BKN Kantor Regional VII Kota Palembang

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan di BKN Kantor Regional VII Kota Palembang ?, serta Bagaimanakah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di BKN Kantor Regional VII Kota Palembang ? Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Terdapat 2 variabel yang digunakan, yaitu Analisis Sistem Administrasi Perpajakan. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan *setting* dari berbagai sumber dan cara, melalui studi kepustakaan dan penelitian arsip. Hasil analisis menunjukkan bahwa Administrasi Perpajakan sudah dilaksanakan di BKN Kantor Regional VII Kota Palembang. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan data perpajakan bagi wajib pajak di kantor ini sudah efektif dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk sebagai petugas yang mengkoordinir wajib pajak di kantor ini, untuk mengetahui kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya misalnya dalam SPT menunjukkan kelebihan pembayaran, SPT pajak penghasilan menunjukkan rugi, dan SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu.

Kata kunci : Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Tubagus Roqi / 222016149 / 2016 / Analysis of the Implementation of the Tax Administration System in Order to Improve Individual Taxpayer Compliance at BKN Regional Office VII Palembang City

The formulation of the problem in this study is: How is the Implementation of the Tax Administration System at BKN Regional Office VII Palembang City?, and How is the Compliance of Individual Taxpayers at BKN Regional Office VII Palembang City? This research includes descriptive research with a qualitative approach. There are 2 variables used, namely the Analysis of the Tax Administration System. The data collection technique is done by setting from various sources and methods, through library research and archive research. The results of the analysis show that the Tax Administration has been implemented at BKN Regional Office VII Palembang City. The effectiveness of the implementation of the completeness of taxation data inspection for taxpayers in this office has been effectively carried out by employees who are appointed as officers who coordinate taxpayers in this office, to determine compliance with fulfilling their tax obligations, for example, the SPT shows overpayments, the income tax return shows a loss, and the SPT not delivered or delivered on time.

Keywords: Tax Administration System, Taxpayer Compliance

No	Nama	NIM	Keterangan
	Tubagus Roqi	222016149	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan paling besar untuk Pemerintah Republik Indonesia selain sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai sumber penerimaan terbesar Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Secara luas, pajak dapat dijadikan instrumen kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi. Kebijakan pajak seharusnya bukan sekedar menentukan apa yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak, siapa yang dikenakan pajak, siapa yang dikecualikan, apa yang akan dijadikan objek pajak apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang, serta bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang. Lebih dari itu, kebijakan pajak mempresentasikan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, mendorong perkembangan dunia usaha, dan pencapaian program-program pemerintah lainnya.

Kebijakan perpajakan yang secara formal dirumuskan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan adalah representasi *grand*

design atau *blue print* pembangunan manusia, ekonomi suatu pemerintahan, dan legislator. Sebagai contoh, program pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, hanyalah retorika belaka jika beban pajak (antara lain direpresentasikan oleh tarif pajak) yang dikenakan terhadap *lower income class* terlalu tinggi. pertumbuhan ekonomipun akan sulit dicapai, jika ketentuan perpajakan yang berlaku justru menyebabkan *cast of taxation* yang sangat tinggi

Suatu kebijakan pada akhirnya hanya dapat terealisasi jika diimplementasikan. Karena itu, administrasi merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan demikian, administrasi perpajakan mempunyai peran yang penting dalam rangka menunjang keberhasilan suatu kebijakan perpajakan yang telah diambil.

Administrasi pajak terdiri dari berbagai subsistem yang paling berkaitan. Masing-masing sub-sistem mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Jika ditinjau dari kenyataan yang ada, yang dimaksud dengan seperangkat unsur dalam administrasi perpajakan adalah undang-undang dan peruran pelaksanaannya, orang-orang atau para pegawai pajak, pajak, gedung, peralatan, sarana, dan prasarana, serta masyarakat Wajib Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP 2007), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pengumut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 21 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), PPh adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan pekerjaan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajaknya dalam negeri.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan misi agar target pendapatan tercapai dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemerintah mulai mengembangkan sistem *online* dan mengandalkan fasilitas internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakan dan melakukan modernisasi didalam sistem administrasi perpajakan yang memiliki ciri khas khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Pemanfaatan teknologi sistem administrasi juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registrasion* dan *e-counseling*. Melalui reformasi ini diharapkan mekanisme kontrol menjadi lebih efektif ditunjang oleh adanya penerapann kode etik pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Salah satu fenomena yang terjadi yang menyebabkan penerimaan pajak sulit tercapai yaitu masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, itu dibuktikan karena masyarakat selaku wajib pajak lupa, atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi. Terlebih ditengah perubahan pandangan masyarakat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, serta berbagai situasi yang muncul serta memberikan kesan negatif terkait masalah perpajakan.

Berdasarkan hasil observasi awal di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Kota Palembang menunjukkan bahwa Sistem

Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) cukup berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sangat efektif untuk mengetahui data wajib pajak baik sudah melaksanakan kewajibannya maupun yang lalai membayar pajak. Untuk itu, wajib pajaklah yang harus memiliki kesadaran dalam membayar pajak agar tidak lagi mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi berupa Pajak Penghasilan (PPH). Menurut Undang-Undang Perpajakan Tahun 2007 pasal 23 dinyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan seseorang atau pribadi yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan, dan dilaporkan kepada kantor pajak. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), lalu bisa melaporkannya melalui Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) melalui fitur lapor pajak *online* atau *e-Filing* di *Online Pajak*.

Apabila Wajib Pajak (WP) terlambat melakukan pembayaran pajak, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga tersebut dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran.

Sanksi perpajakan mesti dipertegas, jika masih ada yang main-main maka *treatmentnya* sederhana, yaitu akan dikenakan sanksi keras, sanksi keras yang dimaksud bisa berupa administratif dan pidana kepada wajib pajak yang melanggar. Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) cukup berpengaruh terhadap penerimaan pajak, apalagi sudah diberlakukannya sanksi pajak berupa sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2% per bulan. Berikut disajikan data tentang wajib pajak di BKN Kantor Regional VII Kota Palembang.

Tabel 1.1
Jumlah wajib pajak terdaftar di BKN Kantor Regional VII Kota Palembang
Tahun 2019 - 2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Pemberlakuan Sanksi Pajak Bagi Wajib Pajak di Tahun 2019-2021		
		Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif	Wajib Pajak Orang Pribadi Non aktif	Wajib Pajak yg Terkena Sanksi
2019	100	94	3	3
2020	100	98	1	1
2021	100	97	1	2

Sumber: BKN Reg VII Kota Palembang, 2022

Tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dari Tahun 2019 sampai Tahun 2021 selalu ada wajib pajak yang mendapat sanksi karena lupa atau lalai 1,82%. Hal ini disebabkan pemahaman wajib pajak terhadap arti pajak itu sendiri.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi di BKN Kantor Regional VII Kota Palembang masih berkisar tentang penerapan sistem administrasi perpajakan belum optimal dilaksanakan, hal ini terbukti dengan masih adanya wajib pajak di kantor ini yang lalai atau lupa melaksanakan kewajibannya membayar pajak, sehingga ada diantara wajib pajak di kantor ini menerima sanksi pajak

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diberi judul “ Analisis Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

di BKN Kantor Regional VII Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan di BKN Kantor Regional VII Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di BKN Kantor Regional VII Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan :

1. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Kota Palembang.
2. Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah:

1. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami manfaat pajak orang pribadi bagi pembangunan Kota Palembang, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

2. Bagi instansi terkait

Dapat mengetahui seberapa pentingnya penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu, khususnya dalam kelancaran proses administrasi pajak di Kota Palembang.

3. Bagi akademi

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi para mahasiswa.

4. Bagi pembaca

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Bahrullah. 2010. *Fungsi Manajemen Keuangan Daerah*. www.osun.org
- Candra, dkk, 2013, *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi. Vol.1 No.1.
- Diana, Sari, 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Direktorat Pajak, 2016, *Lebih Dekat Dengan Pajak*, Direktorat Pajak: Jakarta
- Floriana, 2021, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris di KPP Pratama Serpong)*, Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi. Vol.1 No.1.
- Ilyas, Wirawan, B dan Richard Burton, 2010, *Hukum Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- Ken, Dwijugasteadi, 2016, *Bendahara Wajib Pajak*, Direktorat Pajak: Jakarta
- Kusuma Dani, 2020, *Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1)*. Jurnal Akuntansi, Vol 2, No 2, Universitas Kristen Maranatha
- Lasnofa, Fasmi, 2014, *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak*, Jurnal Akuntansi Multi Paradigma, Vol 5, No 1, Universitas Andalas: Padang.
- Mardiasmo.2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Nonik, 2013, *Pengaruh Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Riset dan Akuntansi, Vol 5, No 1, Universitas Dian Nuswantoro: Semarang.
- Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rahayu, Sri dan Ita Lingga, 2012, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi, Vol.1 No.2.
- Rahan, Abdul, 2010, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Nuansa: Bandung.

- Rapina, dkk, 2011, *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. III No.2.
- Regina Trisnasari, 2019, *Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Magelang*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol 3, No 1, Universitas Brawijaya.
- Rosdiana, Irianto, 2011, *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*, Visi Media Pustaka: Jakarta.
- Sarayanti, 2021, *Pengaruh Sistem Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Gowa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 5, No 6, STIESIA: Surabaya.
- Setiana, 2010, *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Vol 2, No 2, Universitas Kristen Maranatha
- Sofiyana, dkk, 2014, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol 3, No 1, Universitas Brawijaya.
- Suandy, Erly, 2014, *Hukum Pajak*, Edisi. 3. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Umar, 2013, *Desain Penelitian Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat: Bandung. Wardiana, 2007, *Teknologi Informasi*, Tersedia: <http://www.Informatika.lipi.go.id>.
- Yohanes, Andreanto, 2016, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 5, No 6, STIESIA: Surabaya.
- Zauhar, Soesilo, 2012, *Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi dan Strategi*, Bumi Aksara: Jakarta.